



## DIPLOMASI DAN PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Endro Tri Susdarwono<sup>1</sup>, M. Syamsul Rizal<sup>2</sup>,

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang diplomasi dan penggunaan kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Tipe penelitiannya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis secara ilmiah. Analisis data (analyzing), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Bahan (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Peran diplomasi angkatan laut dilaksanakan dengan cara yang positif melalui interaksi dan kerja sama dengan negara sahabat seperti latihan dan operasi bersama, pertukaran personel, maupun forum-forum kerjasama multilateral sebagai wadah untuk melaksanakan diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah.

**Kata kunci:** diplomasi, kekuatan militer, TNI AL

### Abstract:

This research aims to conduct research on diplomacy and the use of military force by the Indonesian National Navy. This research includes qualitative descriptive research that uses primary and secondary data. The type of research is a comprehensive analytical study of primary and secondary materials. The results of the study are presented in a complete, detailed, clear and scientifically systematic manner. Data analysis, namely

<sup>1</sup> Wangsa Syailendra Institute  
e-mail: susdarwonoendrotri@gmail.com.

<sup>2</sup> Wangsa Syailendra Institute

describing the data in the form of good and correct sentences, so that it is easy to read and give meaning (interpreted) so that the results of data analysis make it easier to draw inductive conclusions. The material (data) resulting from the processing is analyzed qualitatively and then discussed. Based on the results of the discussion, conclusions are then drawn as answers to the problems studied. This research concludes that sea power is a means of diplomacy in supporting the government's foreign policy, and is designed to influence the leadership of a country or several countries in peaceful or hostile situations. The role of naval diplomacy is carried out in a positive way through interaction and cooperation with friendly countries such as joint exercises and operations, personnel exchanges, as well as multilateral cooperation forums as a forum for carrying out naval diplomacy in order to support the government's foreign policy.

**Key words:** diplomacy, military strength, TNI AL

## Pendahuluan

Ungkapan "Good fences make good neighbors" kiranya tepat dalam menyikapi pengamanan perbatasan antarnegara. Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga tentunya memiliki perbatasan yang panjang untuk diamankan. Secara kewilayahan Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional ± 7,8 juta km<sup>2</sup> dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas ± 5,9 juta km<sup>2</sup>, yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas ± 2,7 juta km<sup>2</sup> dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas ± 3,2 juta km<sup>2</sup>. Selain itu memiliki panjang garis pantai ± 81.000 km, serta memiliki 17.499 pulau yang terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau tidak/belum bernama. Status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui perjuangan diplomasi yang panjang dan status ini telah diakui dunia sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut Internasional atau the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Indonesia

telah meratifikasi konvensi tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 (Marsetio, 2013).

Sementara itu, hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerjasama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Dalam kaitan kepentingan nasional itulah, bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang (space consciousness) dan kesadaran geografis (geographical awareness) sebagai Negara kepulauan. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman etnis, perwujudan nasionalismenya banyak diwarnai oleh permasalahan politik, ekonomi dan etnisitas serta agama, sehingga berbagai permasalahan tersebut menjadi sulit diselesaikan secara tuntas tanpa melihat dan menghubungkan keterkaitan antara dinamika global dan regional (Arto et al., 2019).

Menyikapi Hal ini logis dan sangat mendasar mengingat, di satu sisi, posisi geografis yang strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam, merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan lingkungan strategis di dunia, Indonesia perlu memastikan kesiapannya mengingat kondisi geografis yang berupa kepulauan dan terdiri dari berbagai etnis & kebudayaan dalam merespon berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dari berbagai sumber dan bentuk yang beragam (Zuhdi, 2014) . Sistem pertahanan negara perlu memperhatikan empat faktor utama yaitu faktor geografis, sumber daya nasional, analisis berpotensi ancaman dan perkembangan IPTEK (Indriyani et al., 2022).

Di dalam konstelasi politik internasional, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi tawar strategis di antara negara-negara tetangga yang mana dalam era keterbukaan informasi ini bisa dikatakan sebagai competitor.

Indonesia kemudian menampakkan keaktifannya dalam berbagai forum regional hingga internasional. Hal ini tentu berkaitan dengan upaya Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional atau dalam istilah hubungan internasional, national interest. Serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional sebagai pertanda bahwa Indonesia merupakan negara besar dan memiliki pengaruh yang besar pula terhadap perkembangan dunia (Yakti, 2016).

Negara-negara dengan kepentingan nasional luas melakukan politik internasional yang amat dinamis. Untuk mencapai kepentingannya, negara tersebut tidak hanya melakukan tindakan politik yang damai saja, yaitu diplomasi, melainkan juga pada waktu yang sama meperkuat diplomasi itu dengan menjalankan tindakan penggunaan kekerasan dan permusuhan lainnya yang bukan serangan militer terbuka (Widjajanto, 2022). Tindakan-tindakan itu dapat mengeruhkan suasana sehingga situasi internasional menjadi tegang, bahkan hampir menyerupai situasi perang. Jadi, dilihat dari sudut hukum, tidak ada perang. Namun, dalam kenyataan yang ada juga bukan kondisi damai karena menguatnya permusuhan antarnegara dan ketagangan yang memuncak. Hal itu jelas sekali dirasakan ketika dunia berada dalam Perang Dingin antara blok barat dengan AS sebagai jagonya dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet.

Perkembangan lingkungan strategis dewasa ini yang berada dalam bingkai globalisasi makin menggarisbawahi pentingnya peran Angkatan Laut. Kompetisi dan kerja sama antar negara dalam bidang politik, ekonomi dan militer menempatkan Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan yang memainkan peran strategis (Asmara et al., 2020). Dari tiga peran tradisional Angkatan Laut, saat ini tugas-tugas yang terkait dengan peran konstabulari dan diplomasi Angkatan Laut jauh lebih mendominasi daripada peran militer.

Dalam konteks Kawasan Asia Tenggara, diplomasi Angkatan Laut telah mengalami intensitas tinggi pasca Perang Dingin. Pada satu dekade terakhir,

aktivitas-aktivitas Angkatan Laut di Kawasan yang terkait dengan diplomasi Angkatan Laut jauh lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Peningkatan tersebut di antaranya terkait dengan semain meluasnya cakupan geografis bagi kepentingan nasional masing-masing negara Asia Tenggara, di samping mengedepannya konflik-konflik pada domain maritime (Marsetio, 2014).

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya "The Influence of Sea Power upon History" mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut (Prasetyo et al., 2019).

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara terus-menerus menyaksikan peningkatan diplomasi Angkatan Laut di Kawasan ini, baik yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara ASEAN maupun kekuatan ekstra Kawasan. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia perlu menata ulang diplomasi Angkatan Laut yang selama ini dianut untuk dapat mengamankan kepentingan Nasional dalam lingkungan strategis yang penuh ketidakpastian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang diplomasi dan penggunaan kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Tipe penelitiannya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis secara ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber

primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literature serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan yang diperlukan, dan inventarisasi bahan (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (reconstructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (systematizing).

Analisis data (analyzing), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) sehingga hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif. Bahan (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

### **Kerangka Teori**

Kita sering berpikir bahwa diplomasi adalah suatu istilah yang stereotype. Namun sebenarnya, diplomasi pada zaman modern merupakan suatu interaksi dan komunikasi antara dua atau lebih pemerintah. Sebagai suatu proses komunikasi, diplomasi mempunyai dua elemen. Pertama adalah negosiasi ketika kedua pihak berbicara tentang sesuatu, baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung atau melalui mediator, mereka sedang melaksanakan negosiasi. Kedua, adalah memberikan tanda atau “signal” – berkata-kata atau berbuat sesuatu dengan sangat intent dalam memberikan pesan kepada pemerintah tertentu, misalnya dengan pidato pemimpin pemerintah tentang pemerintahan orang lain, sanksi, pemutusan hubungan dan lain-lain ini merupakan tanda atau signal.

Termasuk di dalamnya penggunaan kekuatan militer adalah salah satu pemberian tanda-tanda (Supriyatno, 2014).

Pengertian diplomasi yang sederhana di atas, bergulir menjadi memiliki makna yang tidak sederhana dan rumit. Terutama pelaksana diplomasi secara formal, yaitu apa yang disebut dengan berbagai title atau sebutan, misalnya: residen, Menteri, duta besar, atau utusan khusus. Ataupun dipandang dari peran diplomasi itu sendiri, pada diplomasi modern memiliki fungsi sebagai : observasi dan melaporkan; negosiasi; symbol kehadiran suatu pemerintahan; intervensi; dan berperan sebagai propaganda. Pada awalnya, diplomasi diadakan antara lain untuk menghilangkan konflik, menghindari perang, dan mengakhiri perang. Dan apabila tidak berhasil untuk menghindari perang, malah ultimatum merupakan salah satu cara diplomasi, tetapi apabila ultimatum tidak berhasil, maka peranglah yang terjadi (Supriyatno, 2014).

Perkembangan politik internasional memberikan peranan besar bagi negara dalam merumuskan kepentingan nasional. Masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang perlu untuk dicapai. Negara akan melakukan segala upaya untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Negara cenderung egois dengan hanya berfokus pada pencapaian tujuan nasionalnya. Kondisi tersebut yang kemudian yang menyebabkan munculnya ancaman. Untuk menghadapi ancaman diperlukan adanya upaya pencegahan (Handayani, 2018).

Pemikiran Ken Booth tentang kekautan maritime antara lain dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Navies and Foreign Policy* (1977) yang mengulas tentang peran Angkatan Laut. Menurutnya, Angkatan Laut sebagai bagian utama dari kekuatan laut secara universal mempunyai tiga peran penting, yaitu peran militer, peran konstabulari dan perang diplomasi.

Pemikiran Booth itu didasarkan pada penelitiannya terhadap peran Angkatan Laut sejak berabad-abad silam (Mustari et al., 2018).

Peran militer Angkatan Laut dilakukan dengan penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan melalui penyiapan kekuatan untuk perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, menjaga stabilitas Kawasan maritime, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga.

Peran konstabulari dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

Peran diplomasi merupakan peran yang sangat penting bagi setiap yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan.

Dengan demikian secara eksplisit Ken Booth menemukan pula tentang sea power dengan pendekatan terhadap pencapaian peran universal Angkatan Laut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Diplomasi dan Penggunaan Kekuatan Militer**

Keberadaan sebuah negara tidak akan terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maksud dari lingkungan sekitar adalah lingkungan strategis (strategic environment) yang merupakan interaksi dinamis antara konteks internal dan eksternal, hubungan, kecenderungan, peluang (opportunities)

dan ancaman (threats). Pola interaksi tersebut melibatkan aktor negara (state actors) dan aktor-non negara (non-state actors). Sebagaimana yang disampaikan oleh Yarger (2006) bahwa hubungan interaksi dinamis akan melibatkan pola hubungan antara lingkungan alam, aktor negara dan non-negara (Aprianto, 2018).

Hubungan antar bangsa senantiasa diwarnai oleh kompetisi dan kerja sama. Dalam hubungan tersebut, setiap bangsa berupaya untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasionalnya menggunakan semua instrument kekuatan nasional yang tersebut. Mengacu pada Hans J. Morgenthau, politik internasional adlah pertarungan untuk kekuatan. Kekuatan politik (political power) dalam hubungan antar bangsa adalah hubungan bersifat psikologis antara pihak yang mengexercise kekuatan tersebut dan pihak yang menjadi sasaran kekuatan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa kekuatan politik adalah sarana (means) untuk mencapai tujuan (ends) suatu bangsa.

Penggunaan kekuatan laut dalam mendukung politik luar negeri tidak dengan menggunakan senjata, tetapi kekuatan laut ini digunakan sebagai suatu isyarat ataupesan. Penggunaan kekuatan laut ini dapat dilakukan dengan pesan/isyarat sebagai berikut: mengkomunikasikan niat suatu negara, menegosiasiakan masalah bilateral dua negara, menyampaikan pesan kekuatan militer suatu negara. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh bargaining power yang lebih baik dalam menciptakan pembentukan pengaruh suatu negara terhadap negara lain baik pada masa damai maupun perang. Pada masa damai, dilakukan dalam bentuk kunjungan kapal perang ke suatu negara. Kunjungan kapal perang Taiwan ke Indonesia, hampir setiap tahun adalah suatu contoh diplomasi AL yang bertujuan untuk menyatakan eksistensi/keberadaan Taiwan terhadap masyarakat internasional, bahwa Taiwan diakui oleh banyak negara sebagai negara berdaulat, dalam rangka menghadapi kebijakan RRC yaitu

“one China policy”. Muhibah ini juga disebut pameran bendera (Showing The Flag). Naval diplomacy dikatakan sebagai penggunaan kapal perang untuk mendukung politik luar negeri suatu Negara dengan cara memberi sinyal dan bukan dengan cara melepaskan tembakan. Pada intinya adalah komunikasi yaitu dengan cara bernegosiasi dengan menunjukkan kemampuan/ kekuatan yang kita miliki yang lebih dikenal dengan showing the flag (Hermawan & Sutanto, 2022).

Dalam pertarungan untuk kekuatan, dikenal adanya kebijakan prestige. Terdapat dua cara pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu lewat praktik diplomasi dan penggunaan demonstrasi kekuatan militer. Menyangkut penggunaan demonstrasi kekuatan militer, penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk menunjukkan sikap politik suatu negara merupakan pilihan utama bagi banyak negara sejak berabad-abad silam. Prestige ini tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh kapal perang yang tidak dimiliki oleh sistem senjata lainnya, seperti mobilitas dan visibilitas (Haras, 2017).

Demonstrasi kekuatan Angkatan Laut dalam hubungan antara bangsa tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam bingkai kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, demonstrasi kekuatan Angkatan Laut yang lebih dikenal sebagai diplomasi Angkatan Laut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Kebijakan luar negeri sendiri bagaimanapun harus diabdian untuk kepentingan nasional yang bersifat survival dan important.

Kebijakan luar negeri ditempuh oleh para diplomat untuk kekuatan nasional pada masa damai serta strategi dan taktik militer oleh para pemimpin militer untuk kekuatan nasional pada masa perang. Dikaitkan dengan pertarungan untuk kekuatan antar bangsa, salah satu faktor yang menciptakan kekuatan bagi suatu bangsa adalah kualitas diplomasi.

Pertama, diplomasi harus menentukan tujuannya dikaitkan dengan kekuatan actual dan potensial yang tersedia untuk mengejar tujuan tersebut. Kedua, dipomasi harus menilai tujuan bangsa-bangsa lain dankekuatan actual dan potensial yang tersedia untuk mengejar kepentingan mereka. Ketiga, diplomasi harus menentukan sampai sejauh mana tujuan-tujuan yang berbeda tersebut sepadan satu sama lain. Keempat, diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mengejar tujuan-tujuannya.

Baik diplomasi maupun kekuatan militer adalah unsur dari instrument kekuatan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan antara kedua unsur untuk mencapai dan mengamankan kepentingan nasional bukan merupakan hal baru. Pendekatan seperti ini sudah ditempuh sejak lebih dari seribu tahun silam oleh berbagai negara yang pernah eksis dan tengah eksis di muka bumi.

Dalam konteks Angkatan Laut, penggunaan kekuatan Angkatan Laut dalam masa damai dan perang untuk mendukung diplomasi adalah praktik yang lumrah. Oleh karena itu, dikenal, istilah popular seperti gunboat diplomacy (diplomasi kapal perang) dan selanjutnya muncul pula istilah naval diplomacy (diplomasi Angkatan Laut).

Menurut James Cable, gunboat diplomacy adalah senjata yang digunakan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, namun kekuatannya tidak terletak pada kekuatan potensial, tetapi pada kebiasaan untuk mengaplikasikan kekuatan yang tepat (appropriate force) terhadap si yang menjadi subjek perbedaan kedua belah pihak. Walaupun konstelasi geopolitik dunia kin itelah berubah dibandingkan era Perang Dingin, akan tetapi praktik diplomasi Angkatan Laut melalui penggunaan kekuatan tetap ditempuh oleh berbagai negara di dunia.

Diplomasi Angkatan Laut yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut berada dalam bingkai kebijakan luar negeri. Penyebaran kekuatan laut

dalam hal ini kapal perang senantiasa diarahkan untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. Menurut Corbett, strategi Angkatan Laut harus terkait dengan kebijakan luar negeri. Corbett sangat sadar dengan fakta bahwa perang adalah tindakan politik dan fungsi pertama dari armada Angkatan Laut adalah “Untuk mendukung atau merusak upaya diplomasi” (CSIS, 2016).

Oleh karena itu, benign merah antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan merupakan suatu keharusan yang mutlak. Mengacu pada praktik dan pengalaman di negara-negara maju, benang merah tersebut dapat tercipta karena adanya strategi keamnaan nasional. Dengan kata lain, diplomasi Angkata Laut dituntun oleh strategi keamanan nasional.

Karena penggunaan kapal perang dalam rangka melaksanakan diplomasi Angkatan Laut berada dalam bingkai politik, penting untuk dipahami bahwa diplomasi Angkatan Laut adalah penyebaran kekuatan Angkatan Laut secara terbatas untuk mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Siregar & Achnaf, 2021). Terkait dengan hal itu, dalam diplomasi Angkata Laut terdapat empat hal yang harus senantiasa diperhatikan, yakni definitive force, purposeful force, catalytic force dan expressive force.

Mengapa keempat hal tersebut harus diperhatikan? Dalam diplomasi Angkatan Laut, terdapat unsur suasi (suasion). Menace pada Edward N. Luttwak, suasi Angkatan Laut terdiri dari latent naval suasion dan active naval suasion.

Latent naval suasion mempunyai dua turunan yaitu deterrent mode dan supportive mode. Adapun active naval suasion terdiri dari supportive dan coercive. Unsur coercive menurut Luttwak terdiri dari dua dimensi yaitu positif (compellence) dan negative (deterrence).

Suasi merupakan unsur penting dalam diplomasi Angkatan Laut, sebab suasi mendefinisikan semua reaksi, baik secara politik atau taktis, yang ditimbulkan oleh semua pihak terhadap eksistensi, pameran, manipulasi atau penggunaan simbolis instrument kekuatan militer, terlepas dari apakah reaksi merefleksikan niat yang disengaja atau tidak oleh pihak yang melaksanakan penyebaran kekuatan.

Suasi laten muncul sebagai reaksi terhadap penyebaran kekuatan Angkatan Laut secara rutin tanpa suatu sasaran yang spesifik. Adapun suasi aktif adlaah reaksi yang timbul dari penyebaran kekuatan laut dengan sasaran yang spesifik.

Definitive force harus ada dan Nampak dalam diplomasi Angkatan Laut karena kekuatan itulah yang diharapkan mampu menciptakan fait accompli terhadap pihak yang menjadi sasaran diplomasi Angkatan Laut.

Seberapa besar definitive force sebenarnya bersifat relative, akan tetapi penting untuk dipahami kembali bahwa diplomasi Angkatan Laut adalah penggunaan kekuatan Angkatan Laut secara terbatas. Yang utama adalah kemampuan definitive force untuk menimbulkan unsur suasi.

Purposeful force yaitu diplomasi Angkatan Laut melalui penyebaran kapal perang memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum diplomasi Angkatan Laut digelar untuk mengubah kebijakan atau karakter kebijakan luar negeri pemerintahan negara lain yang menjadi sasaran.

Di sini ditekankan pentingnya perumusan tujuan dari penyebaran kapal perang dalam diplomasi Angkatan Laut, sebab tanpa tujuan yang jelas, maka penyebaran itu cenderung tidak punya makna apa-apa. Tujuan yang jelas akan membantu menciptakan unsur suasi, baik suasi laten maupun suasi aktif.

Catalytic force yakni sifat diplomasi Angkatan Laut di mana kekuatan yang dilibatkan yaitu kapal perang memiliki sifat katalis yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Sebagai ilustrasi, dalam penyebaran kapal perang guna melaksanakan diplomasi Angkatan Laut terdapat karakter fleksibel kapal perang, misalnya berada di perairan internasional yang berdekatan dengan perairan territorial negara sasaran.

Apabila dibutuhkan, kapal perang tersebut dalam segera melakukan intervensi (apapun bentuk intervensinya) terhadap negara sasaran dengan memasuki perairan territorial negara tersebut secepatnya dan sesegera mungkin kembali ke perairan internasional setelah intervensi itu dilaksanakan. Inilah yang dimaksud sifat katalis dalam diplomasi Angkatan Laut dan karakter ini tidak dimiliki oleh sistem senjata lainnya (Hadiwijaya, 2022).

Expressive force adalah karakter kekuatan kapal perang yang melaksanakan diplomasi Angkatan Laut, yang mana kapal perang itu digunakan untuk menekankan sikap-sikap dari negara yang bersangkutan.

Karakter itu terbentang dari yang bersifat lunak sampai keras, seperti sekadar pameran kekuatan hingga ancaman penggunaan kekuatan. Dalam expressive force, sangat jelas mengandung unsur suasi seperti yang telah dikemukakan oleh Luttwak.

Hal penting berikutnya yang tidak boleh luput dari perhatian dalam diplomasi Angkatan Laut adalah kapabilitas, kredibilitas, komitmen dan komunikasi. Keempat unsur tersebut memiliki keterkaitan erat dengan unsur suasi, yang mana unsur suasi akan muncul apabila didukung oleh keempat persyaratan. Denan kata lain, dalam praktik di lapangan, kekuatan kapal perang yang disebarluaskan harus berupa capital ship yang dimiliki Angkatan Laut. Tidak semua jenis kapal perang mampu menimbulkan unsur suasi.

## Keberhasilan Diplomasi Angkatan Laut Di Indonesia

Diplomasi Angkatan Laut di Indonesia sebenarnya telah dipraktikkan sejak akhir 1950-an dalam rangka mengamankan kepentingan nasional. Diplomasi merupakan satu dari tiga peran universal yang selalu dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut sejak berbentuk BKR Laut di tahun 1945 hingga kini pada tataran internasional (Nugraha & Sudirman, 2016). Diplomasi TNI Angkatan Laut telah mendapat apresiasi dari berbagai Angkatan Laut negara-negara lain. terakhir, Angkatan Laut Belanda memberikan penghargaan berupa Awards the Medal of Honour Prins Hendrik.

Mengambil contoh dibeberapa negara maju, strategi maritime nasional seringkali identic dan atau sebangun dengan strategi Angkatan Laut dengan melibatkan unsur kekuatan maritime nasional di luar Angkatan Laut itu sendiri. Perumusan strategi maritime nasional Indonesia akan membantu TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan diplomasi Angkatan Laut secara optimal di masa mendatang (Munir, 2015).

TNI Angkatan Laut beberapa kali berhasil melaksanakan diplomasi-dipomasi yang berhasil secara gemilang. Beberapa diplomasi damai TNI Angkatan Laut tersebut telah berhasil mengangkat nama bangsa di percaturan politik dan diplomasi di tingkat regional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah misi United Nation Interim Force in Lebanon's Maritime Task Force (UNIFIL MTF), Pembebasan MV. Sinar Kudurs di Somalia, Pelayaran Muhibab KRI Dewaruci, Penanganan Pengungsi Pulau Galang dan Pengusiran kapal fery Lusitania Expresso.

## Kesimpulan

Kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang

bermusuhan. Peran diplomasi angkatan laut dilaksanakan dengan cara yang positif melalui interaksi dan kerja sama dengan negara sahabat seperti latihan dan operasi bersama, pertukaran personel, maupun forum-forum kerjasama multilateral sebagai wadah untuk melaksanakan diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah.

## **Referensi**

- Aprianto, I.N.P.A. (2018). Information Technology Design Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara. Surabaya: Bintang.
- Arto, R.S., Prakoso, L.Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, 5(2), 65-86.
- Asmara, R., Octavian, A., & Hidayat, A.S. (2020). Sumber Daya Strategi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. Jurnal Maritim Indonesia, 8(2), 154-163.
- Centre for Strategic and International Studies. (2016). Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek. Pusat P2K-OI dan CSIS.
- Hadiwijaya, B. (2022). Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(2), 418-429.
- Handayani, S. (2018). Strategi Pertahanan Maritim Republik Rakyat Tiongkok Di Laut Cina Timur. Skripsi FISIP Universitas Jember.
- Haras, Y.M. (2017). Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan. Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan, 3(2), 1-14.

- Hermawan, T., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Analisa Ancaman dan Kekuatan Laut. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 363-371.
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M.I., & Uksan, A. (2022). Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna. Cakrawala: *Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(1), 29-42.
- Marsetio, D. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Marsetio. (2013). Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, 17(1), 1-18.
- Munir, D. (2015). Satukan NKRI dengan mewujudkan negara Maritim Indonesia, <http://www.dekin.kkp.go.id/news> diakses pada tgl. 24 Agustus 2023, pukul 14.35. WIB.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(2), 17-36.
- Nugraha, M.H.R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175-182.
- Prasetyo, K.A., Prakoso, L.Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 31-50.
- Siregar, H., & Achnaf, M. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Modernisasi Alutsista TNI AL. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(5), 134-142.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Widjajanto, A. (2022). Pertahanan Laut di Era Geopolitik V. Lemhanas.

Yakti, P.D. (2016). TNI Angkatan Laut sebagai World Class Navy pada Strategi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia, Gema Keadilan Edisi Jurnal, 1(1), 195-215.